

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh Pendapatan Per Kapita, Investasi Sektor Industri, Keterbukaan Perdagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Manufaktur terhadap Deindustrialisasi Prematur yang diprosikan melalui Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDRB di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2010-2024, berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian tersebut:

1. Pendapatan Per Kapita tidak berpengaruh terhadap Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDRB, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Demikian pula, variabel kuadratik pendapatan per kapita tidak berpengaruh dan pola yang terbentuk adalah U, bukan U terbalik sebagaimana diprediksi dalam teori deindustrialisasi prematur. Hasil ini juga tidak sejalan dengan teori *pattern of development* Chenery dan Syrquin (1975), yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan per kapita semestinya diikuti oleh penguatan peran manufaktur dalam struktur perekonomian, sehingga memperkuat dugaan bahwa transformasi struktural di Pulau Jawa tidak sepenuhnya digerakkan oleh faktor pendapatan per kapita semata.
2. Investasi Sektor Industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDRB, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi, baik PMDN maupun PMA, mampu memperkuat kapasitas produksi dan daya saing sektor manufaktur. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik Solow (1956), yang menekankan bahwa akumulasi modal merupakan salah satu pendorong utama peningkatan output dan kapasitas produksi suatu perekonomian.
3. Keterbukaan Perdagangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDRB, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, karena arah pengaruh yang dihasilkan berlawanan dengan dugaan awal yang bersifat negatif.

Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan di Pulau Jawa, alih-alih melemahkan, justru turut menguatkan peran sektor manufaktur dalam perekonomian. Hasil ini sejalan dengan kerangka teori Heckscher-Ohlin, mengingat komposisi impor Pulau Jawa yang didominasi oleh bahan baku dan barang modal turut mendukung kegiatan produksi manufaktur dalam negeri.

4. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Manufaktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDRB, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor manufaktur berpotensi menjadi salah satu faktor yang dapat menahan laju deindustrialisasi prematur di Pulau Jawa. Hasil ini sejalan dengan model pertumbuhan Solow (1956), yang menjelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja pada dasarnya merupakan fungsi dari akumulasi modal dan kemajuan teknologi, sehingga peningkatan produktivitas mencerminkan kemampuan sektor manufaktur dalam menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
5. Secara simultan, keempat variabel (Pendapatan Per Kapita, Investasi Sektor Industri, Keterbukaan Perdagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Manufaktur) berpengaruh signifikan terhadap Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDRB, dengan kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 92,03%. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika deindustrialisasi di Pulau Jawa ditentukan oleh interaksi berbagai faktor struktural secara bersamaan, bukan oleh satu faktor tunggal. Namun, karena pola hubungan nonlinear (kurva U terbalik) antara pendapatan per kapita dan kontribusi manufaktur tidak terkonfirmasi secara statistik, sifat "prematur" dari deindustrialisasi sebagaimana didefinisikan Rodrik (2015) belum dapat dibuktikan secara empiris pada periode dan wilayah penelitian ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut saran yang dapat disampaikan:

### 5.2.1 Saran Teoritis

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian di luar Pulau Jawa serta menggunakan periode waktu yang lebih panjang, guna memperoleh gambaran dinamika deindustrialisasi yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya yang akan membahas topik serupa disarankan untuk memasukkan variabel tambahan yang secara teoritis turut berpotensi memengaruhi deindustrialisasi, seperti upah minimum, nilai tukar, urbanisasi, maupun tingkat adopsi teknologi pada masing-masing wilayah, agar model penelitian dapat menjelaskan determinan deindustrialisasi secara lebih menyeluruh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menangani potensi masalah endogenitas, khususnya pada variabel produktivitas tenaga kerja yang berpotensi memiliki hubungan dua arah dengan kontribusi sektor manufaktur, misalnya dengan menggunakan variabel produktivitas dengan jeda waktu (*lag*) atau *lag productivity*.

### 5.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah daerah di Pulau Jawa, khususnya provinsi dengan realisasi investasi sektor industri yang masih rendah seperti DI Yogyakarta yang hanya memiliki 1 perusahaan Kawasan Berikat (Bapennas, 2021), Pemerintah daerah perlu dengan agresif menginisiasi pembentukan kawasan berikat atau kawasan industri yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Selain itu, kebijakan terkait meningkatkan investasi tidak hanya cukup dengan mengandalkan regulasi fiskal, melainkan harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung industri yang spesifik dan mengurangi hambatan birokrasi.
2. Pemerintah diharapkan dapat menjaga arah kebijakan perdagangan secara seimbang. Selain itu, pemerintah dapat mengatasi hambatan pasokan barang antara (*intermediate goods*) dengan mempercepat integrasi sistem logistik nasional, membangun dan mensertifikasi laboratorium pengujian industri domestik standar internasional, merumuskan skema insentif bagi Perusahaan Multinasional (MNC) yang secara aktif membangun *linkage*

bisnis dan melakukan transfer teknologi agar keterbukaan perdagangan benar-benar menghasilkan *spillover effect* bagi industri manufaktur domestik

3. Pemerintah daerah maupun pelaku industri di Pulau Jawa diharapkan tidak hanya sekedar meningkatkan investasi pada pelatihan vokasi secara umum, tetapi mengarahkannya pada pembenahan yang lebih mendasar. Kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini masih bersifat generik, seperti menjahit dan perbengkelan dasar, perlu direformasi menjadi kurikulum yang sesuai kebutuhan Industri. Serta menyederhanakan birokrasi klaim insentif *Super Deductible Tax* agar sektor swasta semakin terdorong untuk mendanai pelatihan vokasi secara mandiri. Sehingga tren peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor manufaktur diharapkan dapat terus terjaga.
4. Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita belum diikuti penguatan sektor manufaktur, pemerintah daerah disarankan merumuskan kebijakan industrialisasi yang mampu menjaga daya saing sektor manufaktur seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga pergeseran struktur ekonomi menuju sektor jasa terjadi pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi setelah sektor manufaktur berkembang secara optimal.